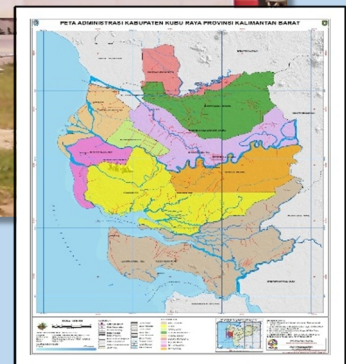


**RENCANA KERJA (RENJA)  
TAHUN 2023  
KECAMATAN KUALA MANDOR B**



**PEMERINTAH KABUPATEN  
KUBU RAYA**

## KATA PENGANTAR

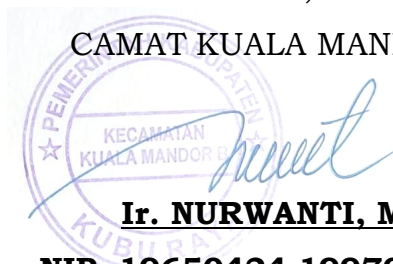
Dengan memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023 ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan, sekaligus sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat untuk dijadikan bahan masukan dalam membuat dan mengambil kebijakan lebih lanjut dan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Kerja ini, kami ucapkan terima kasih

Kuala Mandor B, 14 Juli 2022

CAMAT KUALA MANDOR B



**Ir. NURWANTI, M.M**

**NIP. 19650424 199703 2 005**

## DAFTAR ISI

	Hal	
KATA PENGANTAR .....		i
DAFTAR ISI .....		ii
BAB I : PENDAHULUAN		
A.Latar Belakang.....	1	
B.Landasan Hukum .....	4	
C.Maksud dan Tujuan.....	8	
D. Sistematika Penulisan.....	8	
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU		
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9	
B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	27	
C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	29	
D. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD.....	30	
E. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	42	
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN		
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	48	
B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	50	
C. Program dan Kegiatan .....	53	
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
A. Alokasi Anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023.....	65	
BAB V : PENUTUP		

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun yang juga berisi rencana pembangunan tahunan daerah, mengatur tentang peranan dan tanggung jawab kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja SKPD, keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah Terpilih dengan RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD, pokok pokok isi dokumen Rencana Kerja SKPD, waktu pelaksanaan Musrenbang daerah dan penyampaian RKPD.

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Kuala Mandor B mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

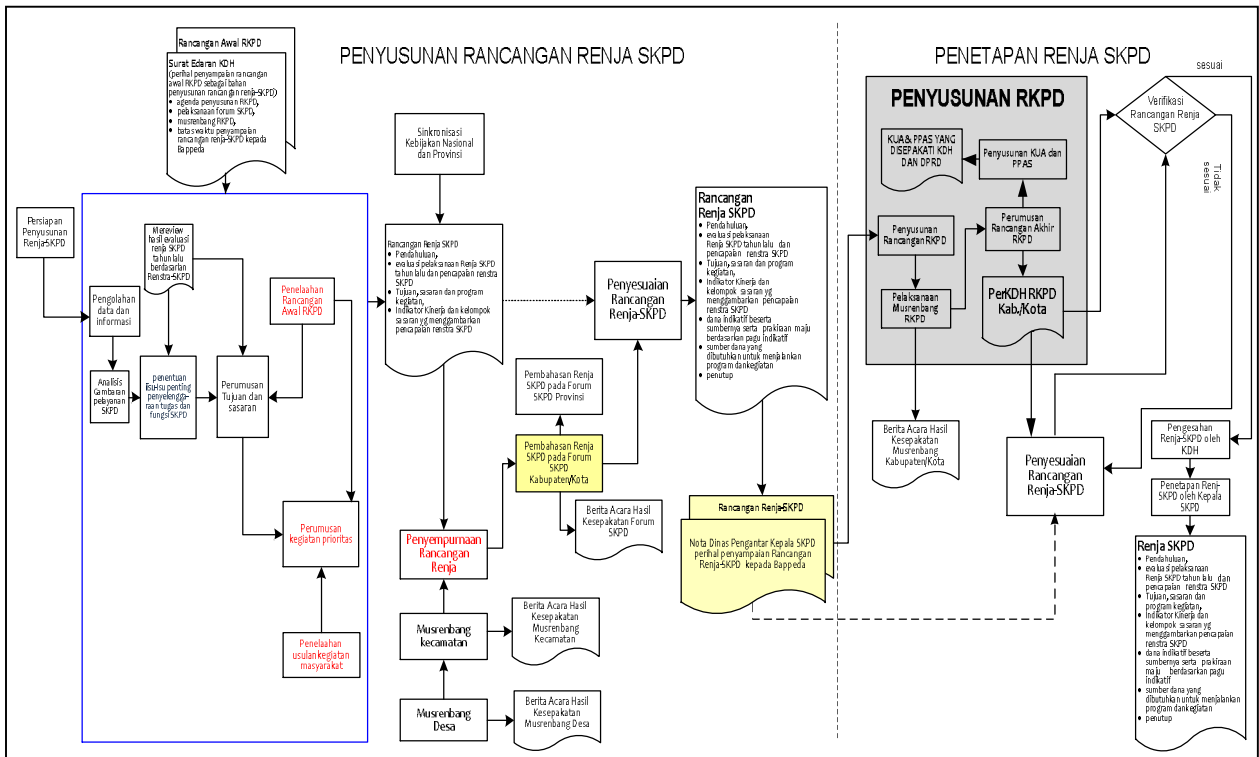
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kuala Mandor B sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 ini merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang berfungsi menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kuala Mandor B mengacu pada RPJMD Kabupaten Kubu Raya. Rencana Kerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang perencanaan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Alur Tahapan Penyusunan RENJA**



## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan

- Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  13. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
  14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana



- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 43);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 42 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 16);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 82);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 43);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 65.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021

- Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 76);
29. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 61 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2022 Nomor 61)
  30. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

### **1.3 Maksud Dan Tujuan**

#### **A. Maksud**

Sebagai pedoman dan arah bagi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 - 2024.

#### **B. Tujuan**

Memperlancar tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai unsur penunjang pemerintah kabupaten Kubu Raya dalam rangka mendukung tercapainya visi, misi, kebijakan dan program pemerintah Kabupaten Kubu Raya tahun 2023.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD , RPJMD, dan RKPD, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Kuala Mandor B yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

## BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUALA MANDOR B TAHUN 2021

Bab ini menggambarkan hasil realisasi dan usulan program dan kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B, yang berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kuala Mandor B, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD dan Usulan Program dan Kegiatan.

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sub bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional berdasarkan RKP Tahun 2023.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2019 – 2024. Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target Tahun 2023.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sub Bab ini memuat program dan kegiatan yang diuraikan secara garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, meliputi :

1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan.
2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

## BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Program serta Kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun Anggaran 2023

## BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KUALA MANDOR B TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kuala mandor B Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kecamatan Kuala mandor B**

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan Tahun 2023 diperlukan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2021. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan SKPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD.

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Pada Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya mendapat alokasi anggaran **Rp. 3.105.551.683,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.073.964.140,00** atau sebesar **98,98%** yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar **Rp. 1.759.705.932,00** dengan Realisasi **Rp. 1.747.428.388,00** atau **98,33%** dan Belanja Barang dan Jasa sebesar **Rp. 1.158.502.177,00** dengan realisasi **Rp. 1.139.192.178,00** atau **98,33%** serta belanja Modal sebesar **Rp. 187.343.574,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 187.343.574,00** atau **100 %**. (per 31 Desember 2021)

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan**  
**Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Kubu Raya**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
<b>PERMENDAGRI NO 13</b>														
4	01	11	01		<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	<b>PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	100%	100%	100%	-	-	-	100%	100%
4	01	11	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Komunikasi, Air dan Listrik Kantor	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	-	-	-	24 Bulan	75%
4	01	11	01	006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang patuh pembayaran pajak	10 Kendaraan roda 2	5 Kendaraan roda 2	5 Kendaraan roda 2	-	-	-	5 Kendaraan roda 2	50%
4	01	11	01	007	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Jumlah Kebutuhan Materai	900 Lembar	700 Lembar	200 Lembar	-	-	-	700 Lembar	75%
4	01	11	01	008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan yang terpenuhi	9 Orang & 36 bulan	6 Orang & 24 bulan	3 Orang & 12 bulan	-	-	-	6 Orang & 24 bulan	75%

4	01	11	01	010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Kebutuhan ATK Kantor	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	-	-	-	24 Bulan	75%
4	01	11	01	011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	-	-	-	24 Bulan	75%
4	01	11	01	012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Kelistrikan dan Penerangan Kantor	36 Bulan	24 Bulan	12 Bulan	-	-	-	24 Bulan	75%
4	01	11	01	015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang Terpenuhi	1.080 Exp	720 Exp	360 Exp	-	-	-	720 Exp	75%
4	01	11	01	017	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Rapat yang terpenuhi kebutuhan Makanan dan Minuman nya	36 Kali	24 Kali	12 Kali	-	-	-	24 Kali	75%
4	01	11	01	018	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah	6 Kali	4 Kali	2 Kali	-	-	-	4 Kali	75%
4	01	11	01	019	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	298 Kali	106 Kali	192 Kali	-	-	-	106 Kali	75%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang terpenuhi	4 unit	4 unit	-	-	-	-	4 unit	75%
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang terpenuhi	302 Unit	52 Unit	250 Unit	-	-	-	52 Unit	25%

					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpenuhi	16 Unit	6 Unit	10 Unit	-	-	-	6 Unit	75%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah Unit yang dipelihara	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-	-	12 Bulan	100%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit yang dipelihara	5 Unit	-	5 Unit	-	-	-	5 Unit	0%
					Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer	Jumlah Unit yang dipelihara	6 Unit	3 Unit	3 Unit	-	-	-	3 Unit	100%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Penyediaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang terpenuhi	22 Stell	22 Stell					22 Stell	100%
					Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Batik yang terpenuhi	22 Stel	22 Stell	-	-	-	-	22 Stell	100%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	6 Orang	6 Orang	-	-	-	-	6 Orang	0%
					Penyusunan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	-	1Dokumen	-	-	-	-	0%
					Penyusunan Evaluasi jabatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	1 Dokumen	-	1 Dokumen	-	-	-	-	0%



					<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen-	-	-	-	2 Dokumen	75%
					Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen-	-	-	-	2 Dokumen	75%
					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	75%
					Penyusunan Renja, Rka, DPA dan DPPA	Jumlah Dokumen yang tersusun	12 Dokumen	8 Dokumen	4 Dokumen	-	-	-	8 Dokumen	75%
					penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan LKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	75%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE KETETAPAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan SKPD	Jumlah Orang yang Mengikuti	3 Orang	3 Orang	-	-	-	-	3 Orang	100%
					Fasilitasi penataan aset pada SKPD	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%
					<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Penyusunan Rencana Straegis (Renstra) SKPD	Jumlah Dokumen yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50%
					Sistem informasi perencanaan, monitoring, evaluasi pembangunan	Jumlah Dokumen yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	75%

					<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN, KETATALAKSANAAN DAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah Doumen yang tersusun	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50%
					Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Jumlah Dokumen Dokumen Kepuasan Masyarakat (SKM)	2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	-	-	2 Dokumen	50%
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN</b>	<b>FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPATU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Penataan Kearsipan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kgiatan	-	-	-	1 Kegiatan	100%
					Penyusunan Profil Kecamatan	Jumlah Dokumen yang tersusun	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	75%
					<b>PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI</b>	<b>PERSENTASE TERLAKSANANYA WEB DIKECAMATAN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Pembuatan Website	Jumlah Unit Web yang terpenuhi	1 Website	1 Website	-	-	-	-	1 Website	50%
					<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	<b>JUMLAH PENYELENGGARAAN FESTIVAL SENI DAN BUDAYA</b>	<b>3 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	-	-	-	<b>2 Kegiatan</b>	<b>75%</b>
					Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah Kegiatan Yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%

					<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN</b>	<b>JUMLAH PEMUDA PELOPOR</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Fasilitasi Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	1 Kegiatan	75%
					<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>PERSENTASE PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Pelaksanaan Lomba Desa	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%
					<b>PROGRAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN</b>	<b>JUMLAH TITIK HOTSPOT</b>	<b>18 Titik</b>	<b>12 Titik</b>	6 Titik	-	-	-	<b>12 Titik</b>	<b>75%</b>
					Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan	Jumlah Desa yang terbina	18 Titik	12 Titik	6 Titik	-	-	-	12 Titik	75%
					<b>PROGRAM PEMBINAAN MENTAL SPIRITUAL UMAT BERAGAMA</b>	<b>JUMLAH KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DIFASILITASI</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	-	-	-	-	<b>1 Kegiatan</b>	<b>100%</b>
					Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	-	1 Kegiatan	100%
					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN</b>	<b>FASILITASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPATU KECAMATAN (PATEN)</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>
					Pembinaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	12 Desa	6 Desa	-	-	-	12 Desa	75%
					Pembinaan Sosial Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	12 Desa	6 Desa	-	-	-	12 Desa	75%

					Koordinasi Pelaksanaan pembangunan	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	12 Desa	6 Desa	-	-	-	12 Desa	75%
					Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	12 Desa	6 Desa	-	-	-	12 Desa	75%
					Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kependudukan	Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia	9 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	-	-	-	6 Jenis	75%
					Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%
					Fasilitasi dan Pembinaan ADD	Jumlah Desa yang terbina	18 Desa	12 Desa	6 Desa	-	-	-	12 Desa	75%
					Fasilitasi peningkatan pelayanan Perizinan	Jenis dokumen Pelayanan yang tersedia	9 Jenis	6 Jenis	3 Jenis	-	-	-	6 Jenis	75%
					Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%
					Fasilitasi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Jumlah kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%
					Fasilitasi penyelesaian tapal batas antar desa dalam kecamatan	Jumlah Desa yang terbina	12 Desa	6 Desa	6 Desa	-	-	-	6 Desa	75%
					Fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	Jumlah kegiatan yang terlaksana	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	-	2 Kegiatan	75%
<b>PERMENDAGRI NO 90 TAHUN 2019</b>														
<b>7</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>				<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA dan DPPA)	10 Dokumen	-	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	4 Dokumen	9 Dokumen	97%
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (Laporan Kinerja)	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan							
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun (LPPD, SIPPD, ANJAB dan EVAJAB)	8 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	75%
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan							
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Pegawai yang Menerima Gaji	36 Orang / Bulan	-	18 Orang / Bulan	18 Orang / Bulan	100%	18 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	100%
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang / Bulan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LKPD)	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Dokumen yang disusun (LRA)	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	100%
						Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	26 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
						Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	98%
						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	-	-	-	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Yang dibuat	18 Stel	-	-	-	-	18 Stel	18 Stel	100%
						Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	18 Stel							
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	-	3 Orang	3 Orang	100%	-	3 Orang	100%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Instalasi Listrik Kantor	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Bulan	18 Bulan	75%



						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Bulan	18 Bulan	75%
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Bulan	18 Bulan	100%
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Bulan	18 Bulan	49%
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	585 Kali	-	197 Kali	197 Kali	100%	194 Kali	391 Kali	10%

						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Barang Milik Daerah</b>	<b>274 Unit</b>	-	<b>260 Unit</b>	<b>260 Unit</b>	<b>100%</b>	<b>3 Unit</b>	<b>3 Unit</b>	<b>100%</b>
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Unit yang terpenuhi	1 Unit	-	-	-	-	1 Unit	1 Unit	100%
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit							
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	260 Unit	-	260 Unit	260 Unit	100%	-	-	100%
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit							
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit yang terpenuhi	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	2 Unit	100%

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Jumlah Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Bulan	18 Bulan	75%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kebutuhan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Bulan	18 Bulan	75%	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	<b>47 Unit</b>	-	<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>100%</b>	<b>9 Unit</b>	<b>17 Unit</b>	<b>36%</b>	

7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan yang dibayarkan pajaknya	9 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	4 Unit	9 Unit	100%
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit yang Dipelihara	8 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	8 Unit	75%
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen yang tersusun	2 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	75%
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan	3 dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	75%
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Surat Rekomendasi yang dikeluarkan	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Dokumen	75%
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Dokumen	100%

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100%</b>	-	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>8 Kegiatan</b>	-	<b>2 Kegiatan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>100%</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>4 Kegiatan</b>	<b>50%</b>		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	100%		
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	75%		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Desa yang Dibina</b>	24 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	50%
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi yang Dilaksanakan	12 Kali	-	6 Kali	6 Kali	100%	6 Kali	12 Kali	100%
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	179 Laporan	-	-	-	-	-	-	-
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	50%
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	2 Kegiatan	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	-	1 Kegiatan	50%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-



-	7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	01	06	2.01			<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah Desa yang Dibina</b>	24 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	50%
7	01	06	2.01	02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	12 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	100%
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	12 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	100%
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	12 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	2 Desa	100%
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi	12 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	100%
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-

7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa yang Difasilitasi	12 Desa	-	6 Desa	6 Desa	100%	6 Desa	12 Desa	100%
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	192 Laporan	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel yang telah disajikan diatas, tidak semua tingkat capaian target Renstra bisa dipersentasekan karena tidak konsistennya kegiatan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai 2021.

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada dalam rangka Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas dan Profesional yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kuala mandor B Tahun 2019-2024, sesuai dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD, dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

1. Kedudukan Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya sebagai lembaga penunjang yang membantu Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Kubu Raya.

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kuala Mandor B**  
**Kabupaten Kubu Raya**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			81,37/ Sangat Baik	81,43/ Sangat Baik	81,52/ Sangat Baik	82,00/ Sangat Baik	81,65/ Sangat Baik	-	81,52 / Sangat Baik	82,00 / Sangat Baik	
2	Nilai SAKIP			74,31/ BB	76,25 / BB	80,50 / A	81,00 / A	-	-	80,50 / A	81,00 / A	Penilaian untuk SAKIP Tahun 2021 belum ada penilaian
3	Jumlah Desa Mandiri			1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	0	-	1 Desa	1 Desa	Dari Target yang diharapkan terealisasi 0 Desa Mandiri di Kecamatan Kuala Mandor B sehingga Capaian Kinerja yang didapat 0 Desa. Karena berdasarkan data dari <a href="http://www.sid.kemendesa.go.id">www.sid.kemendesa.go.id</a> , bahwa status desa berdasarkan IDM untuk desa yang ada di



### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kecamatan Kuala Mandor B merupakan perangkat daerah kabupaten Kubu Raya sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kecamatan Kuala Mandor Badalah wilayah kerja Camat Kuala Mandor B sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dilimpahkan oleh Bupati Kubu Raya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai organisasi pemerintah Kabupaten Kubu Raya, kecamatan adalah salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kubu Raya yang disebut Kantor Camat Kuala Mandor B.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Perencanaan belum didukung oleh data akurat dan dokumen perencanaan yang menampilkan kondisi lapangan khas Kubu Raya.
2. Sebagian besar aspirasi dan kebutuhan masyarakat belum tertampung dalam dokumen perencanaan, ini disebabkan antara lain karena harapan masyarakat yang terlalu besar terhadap proses perencanaan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya dihadapkan pada persoalan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
3. Kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum memadai dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga menghambat proses pelaksanaan program dan kegiatan
4. Sarana dan prasarana belum menunjang untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, sementara Pemerintah daerah dihadapkan pada tekad untuk tetap memprioritaskan pelayanan ke masyarakat dengan sarana prasarana penunjang seadanya.

Untuk mengoptimalkan capaian Kinerja Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang, Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya akan menempuh cara-cara sebagai berikut:

1. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur dalam perencanaan pembangunan;
2. Memberikan ruang bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis dan lain-lain;
3. Mengusulkan penambahan maupun perbaikan sarana prasarana kantor.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Forum Musrenbang;
5. Menambah jumlah sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas di Kecamatan Kuala mandor B sehingga kegiatan yang terprogram dapat berjalan dengan lancar.

Selain permasalahan dan pemecahan permasalahannya, faktor-faktor yang berjalan baik atau sumber daya yang dapat dikendalikan yang ada di Kecamatan Kuala mandor B Kabupaten Kubu Raya antara lain:

- a. Struktur organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Kecamatan Kuala mandor B telah tertata dengan baik melalui Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kuala Mandor B. Dengan demikian, pegawai dapat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan mekanisme dan aturan yang telah tersedia.
- b. Komitmen dan dedikasi pimpinan dan pegawai Kecamatan Kuala mandor B yang tinggi.  
Pimpinan dan seluruh pegawai Kecamatan Kuala mandor B mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan terutama untuk mendukung visi Kabupaten Kubu Raya yaitu terwujudnya Kabupaten Kubu Raya yang maju, harmonis, berbudaya dan memiliki daya saing.
- c. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dengan pegawai Kecamatan Kuala mandor B, Pimpinan Kecamatan Kuala mandor B memiliki hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan staf/bawahannya (hubungan vertikal), begitu pula dengan sesama



pegawai (hubungan horizontal). Rasa kebersamaan sebagai satu *team work* selalu dibina dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas pokok Kecamatan Kuala mandor B.

- d. Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Kuala mandor B yang cukup memadai. Sebagian besar pegawai Kecamatan Kuala mandor B berpendidikan strata 1 (S1) dan Diploma (D3), kondisi ini memudahkan terjadinya transformasi informasi dari berbagai sumber sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan berkualitas.

Sementara faktor-faktor di Kecamatan Kuala mandor B yang tidak berjalan dengan baik atau sumber daya yang dibutuhkan tetapi tidak dimiliki oleh Kecamatan Kuala mandor B adalah:

- a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas pegawai yang berkompetensi perencanaan.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang belum mendukung.
- c. Kondisi ruang kerja beberapa bidang kurang memadai.

#### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023**  
**Kabupaten Kubu Raya**

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Anggaran
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>				
<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>2,903,457,017</b>	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				<b>3,096,648,050</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,604,023,377</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,709,365,118</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>33,243,301</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>27,243,301</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	16,506,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	12,506,800

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,039,826	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	10,039,826
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	6,696,675	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4,696,675
<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,205,261,330</b>	<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2,335,312,783</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang / Bulan	2,198,407,285	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang / Bulan	2,278,138,738
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Orang		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Penatausahaan/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Orang	46,320,000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5,354,350	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7,354,350

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1,499,695	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	3,499,695
<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5,280,692</b>	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5,280,692</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,431,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1,431,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,349,857	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2,349,857
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,499,835	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1,499,835
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>30,000,000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	30,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	0

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>179,955,024</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>174,744,024</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,936,200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Rasau Jaya	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2,936,200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	62,802,279	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	62,802,279
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,514,545	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	14,514,545
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 Dokumen	720,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	360 Dokumen	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174 Laporan	98,982,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174 Laporan	94,491,000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3 Unit</b>	<b>37,459,000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>3 Unit</b>	<b>53,960,288</b>

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	21,210,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	30,000,000
Pengadaan Mebel	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	3,750,000	Pengadaan Mebel	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	9,461,288
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	12,499,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14,499,000
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>101,858,220</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2 Laporan</b>	<b>101,858,220</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	17,600,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	84,258,220	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	84,258,220
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>21 Unit</b>	<b>10,965,810</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	<b>21 Unit</b>	<b>10,965,810</b>

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	725,810	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	725,810
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10,240,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	10,240,000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>42,873,380</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>56,281,540</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>6,011,380</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>100%</b>	<b>6,011,380</b>
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6,011,380	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	6,011,380
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>36,862,000</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>100%</b>	<b>50,270,160</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3,431,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1 Dokumen	3,431,000

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	3,431,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	1 Laporan	3,431,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	30,000,000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	43,408,160
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100%</b>	<b>76,279,760</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>100%</b>	<b>77,729,377</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>76,279,760</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>2 Kegiatan</b>	<b>77,729,377</b>
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	26,029,760	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Masyarakat	26,029,760
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	50,250,000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	51,699,617



<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>28,062,000</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100%</b>	<b>33,662,000</b>
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah desa yang Dibina</b>	<b>6 Desa</b>	<b>28,062,000</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah desa yang Dibina</b>	<b>6 Desa</b>	<b>33,662,000</b>
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	63 Laporan	28,062,000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	63 Laporan	33,662.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>18,000,000</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>62,591,515</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>18,000,000</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>1 Kegiatan</b>	<b>62,591,515</b>

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	300 Orang	18,000,000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	62,591,515
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>134,218,500</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>157,018,500</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah desa yang Dibina</b>	<b>6 Desa</b>	<b>134,218,500</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>Jumlah desa yang Dibina</b>	<b>6 Desa</b>	<b>157,018,500</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	67,739,500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	75,539,500

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	3,000,000
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	31,739,500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	39,539,500
Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	2,400,000	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	2,400,000
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	96 Laporan	29,339,500	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	96 Laporan	36,539,500
<b>TOTAL</b>				<b>2,903,457,017</b>	<b>TOTAL</b>				<b>3,096,648,050</b>

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023, Prioritas yang terkait dalam program adalah kumpulan-kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran tentunya akan dapat mewujudkan keberhasilan pencapaian misi yang pada akhirnya dapat pula mendukung keberhasilan pencapaian visi suatu organisasi. Untuk menjabarkan beberapa program perlu ditetapkan beberapa kegiatan pokok.

Adapun Usulan program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan dan diprioritaskan pada usaha untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka ditetapkan program dan kegiatan Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023 Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023**  
**Kabupaten Kubu Raya**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan (Pelaksana)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Poros Kuala Mandor A RT.01/RW.04 Dusun Karya Bersama Desa Kuala Mandor A (109.502) (0.03833), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	200 X 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Poros Kuala Mandor A, RT.04/RW.04 Dusun Karya Bersama Desa Kuala Mandor A (109.609) (0.00961), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	230 x 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3	WC bangunan gedung yang rusak/belum tersedia	Desa Kuala Mandor A (109.596) (0.00739) (13 Unit), Kab. Kubu Raya	Jumlah WC yang diperbaiki/dibangun	13 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

4	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Jalan Lingkungan RT.05/RW.01 Dusun Karya Usaha Desa Kuala Mandor A (109.501) (-0.03797), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	200 X 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5	Minimnya akses ke lahan pertanian (jalan usaha tani)	POktan Teluk Setak Dusun Karya Bersama RT.02/RW.06 Desa Kuala Mandor A (109.594) (0.00602), Kab. Kubu Raya	Jumlah Akses ke Lahan Pertanian yang dibangun	200 X 3 Meter	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
6	Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia	dusun retok bebantek RT 002/RT 003(0,10446, 109,5029), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun		Dinas Kesehatan
7	Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia	Tanjung Pasir Dusun Karya Bersama RT.01/ RW.05 Desa Kuala Mandor A (109.600) (0.0065), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun	6 Unit	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia	Jelau Dusun Karya Sejati RT.03/RW.09 (109.596) (0.00725), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun	1 Unit	Dinas Kesehatan
9	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Jaya Sakti RT 002 Desa Kuala mandor B ( 0. 00443. 109. 48766. 31. 3m ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun	3 x 200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
10	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Maju Jaya RT/RW 007/003 ( 0. 0017. 109. 45757. 37. 9m, Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	1 x 200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Minimnya akses ke lahan pertanian (jalan usaha tani)	Dusun Pelita Jaya RT/RW 009/001 ( - 0. 01501. 109. 49947. 27. 7m ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Akses ke Lahan Pertanian yang dibangun	1 x 200 Meter	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Pelita Jaya RT/RW 009/00-01 ( -0. 015. 109. 49946. 32. 1m ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

13	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Pelita Jaya RT 009/001 ( -0. 01144. 109. 49514. 33. 7m ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun Pelita Jaya RT/RW 003/001 jalan Poros Desa Kuala Mandor B ( 0. 01604. 109. 50193. 32. 7m ), Kab. Kubu Raya	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun Pelita Jaya RT/RW 003/001 Jalan Poros Desa Kuala Mandor B ( 0. 02537. 109. 49585. 33m), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	8 x 3000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16	Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia	Dusun Pelita Jaya RT/RW 006/001 Sekolah SMPN 1 Kuala Mandor B ( - 0n. 001. 109. 49435. 30. 1m ), Kab. Kubu Raya	-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia	Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Puskesmas Kuala Mandor B ( -0. 00539. 109. 46475. 33. 6m ), Kab. Kubu Raya	-	-	Dinas Kesehatan
18	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun Jaya Sakti RT/RW 005/002 Sekolah SMKN 1 Kuala Mandor B ( - 0. 00256. 109. 47497. 25. 0m ), Kab. Kubu Raya	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
19	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Kantor Camat Kuala Mandor B ( - 0. 0"17,83645"S 109. 27"48,21037"E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Daerah kabupaten yang diperbaiki/dibangun	5 x 30 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun Pelita Jaya RT/RW 003/001 Jalan Poros Desa Kuala Mandor B Menuju Desa Mega Timur ( -0. 0"51,57425"S 109. 25"29,20753"E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	4 x 5000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
21	Saluran darinase yang rusak/belum tersedia	Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Parit Abak ( -0. 0"17,53164"S 109. 28"3, 43294"E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Saluran darinase yang perbaiki/dibangun	100 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

22	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Parit Abak (-0.0°17,24346"S 109.28°3,49219"E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	2 x 1000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
23	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Dusun Maju Jaya RT/RW 002/003 Parit Abak ( -0.0°41,51135"S 109.28°10,83623"E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	3 x 3 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
24	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	jalan poros desa kubu padi dusun Karya abadi RT 001 R 006, Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	2,5x 200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
25	Pemeliharaan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan	Dusun Karya Abadi RT 001 R 006, Kab. Kubu Raya	Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dipelihara	6x8 Meter	Dinas Perhubungan
26	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Jalan Poros desa Kubu Padi dusun harapan bersama RT 005 RW 004, Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	2,5x 200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
27	Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak	dusun harapan bersama RT 003 RW 004, Kab. Kubu Raya	Jumlah Bibit	60x15000000 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
28	Minimnya dukungan penggunaan sarana pendukung pertanian	Dusun Karya abadi RT001 RW 006, Kab. Kubu Raya	Jumlah ton	5x30000000 Ton	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
29	Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak	Dusun Tunas Harapan RT 003 RW 002, Kab. Kubu Raya	Jumlah Bibit	6000x10000 Ekor	Dinas Perkebunan dan Peternakan
30	Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia	Dusun Karya Abadi / Parit Dawa RT 004 RW 006, Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun	3x150000000 Lokal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia	dusun karya bersama RT 008 RW 001, Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun	1 Unit	Dinas Kesehatan
32	Kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana olahraga	Dusun Tunas Harapan Bersama RT 003 R 002, Kab. Kubu Raya	Jumlah Unit	1 Unit	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata
33	SPAM Perdesaan yang rusak/belum tersedia	dusun Karya Abadi RT 001 RW 006, Kab. Kubu Raya	Jumlah SPAM Perdesaan yang diperbaiki/dibangun	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

34	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Jalan Poros Desa Kubu Padi dusun karya abadi RT 005 Rw 006 ( Dawa ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	2,5x 200 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
35	WC bangunan gedung yang rusak/belum tersedia	dusun harapan bersama RT 004 RW 004 Parit Bakti, Kab. Kubu Raya	Jumlah WC yang diperbaiki/dibangun	1 Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
36	Jaringan irigasi permukaan yang belum tersedia	ujung dusun tunas harapan, dusun harapan bersama dan dusun karya abadi, Kab. Kubu Raya	Jumlah Jaringan Irigasi yang dibangun	15 Km	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
37	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	dusun karya bersama RT 005 RW 001 menuju RT 001 Rw 003 Dusun Karya Murni ( desa Persia[an Padi Jaya ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	1,5x 300 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
38	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	dusun karya murni RT 003 Rw 003 Menuju RT 005 Rw 003 ( Desa Persiapan Padi Jaya ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	1,5x 300 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
39	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Jalan Dusun Karya Murni RT 005 Rw 003 Menuju Dusun Karya Indah RT 001 RW 005 ( desa Persiapan Padi Jaya ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	1,5x 300 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
40	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	dusun Tunas Harapan RT 003 Rw 002, Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	300 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
41	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	dusun tunas harapan menuju harapan bersama, Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	4x12 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
42	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Dusun Harapan Bersama menuju dusun Karya Abadi, Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	4x12 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



43	Bangunan gedung kesehatan yang rusak atau belum tersedia	dusun retok acin RT 001/RW 004(0,12195, 109,50819), Kab. Kubu Raya.	Jumlah Gedung Kesehatan yang diperbaiki/dibangun		Dinas Kesehatan
44	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	jalan lingkungan dusun retok kuala RT 002/RW001 (0,10744, 109,48968), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
45	Keterbatasan benih unggul dan saprodi tanaman perkebunan	dusun karya abadi dan dusun harapan bersama, Kab. Kubu Raya	Jumlah Benih	3 Kelompok	Dinas Perkebunan dan Peternakan
46	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	jalan lingkungan dusun retok bebantek RT 005/RW 003 (0,10858, 109,48968), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki	1000 Meter	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
47	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	jalan lingkungan dusun retok acin RT 003/ RW 004 (0,13764, 109,50119), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
48	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	jalan lingkungan dusun memperigang RT 001/RW 007 (0,16244, 109,48971), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
49	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	jalan poros dusun retok bebantek RT 001/RW 003 (0,10933, 109,49854), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
50	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	jln. dusun retok bebantek rt 001 rw 003 ( 0,10933, 109,501193 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

51	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	jalan lingkungan dusun retok memperigang rt 001 rw 007 ( 0,15815, 109,49345 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan Jembatan yang diperbaiki		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
52	Bangunan gedung sekolah yang rusak atau belum tersedia	dusun retok memperigang rt 001 rw 007 ( 0,176244, 109,48971 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung Sekolah yang diperbaiki/dibangun		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Perlunya bantuan sarana dan prasarana kepada lembaga kebudayaan dan lembaga kesenian	dusun retok acin RT 001/RW 004 ( (0,11981, 109,5029), Kab. Kubu Raya	Jumlah sarana dan Prasarana Lembaga kebudayaan dan Lembaga kesenian		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
54	Pemeliharaan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan	dusun retok bebantek RT 004/RW 003 (0,11271, 109,49125), Kab. Kubu Raya	Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dipelihara		Dinas Perhubungan
55	Pemenuhan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan	dusun retok retok kuala RT 001/RW 001 (0,08065, 109,49163), Kab. Kubu Raya	Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan		Dinas Perhubungan
56	Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak	dusun retok bebantek rt 005 rw 003 ( 0,10468, 169,49861 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan		Dinas Perikanan
57	Keterbatasan benih unggul dan saprodi tanaman perkebunan	dusun retok bebantek rt 003 rw 003 ( 0,10077, 109,50429 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Bibit		Dinas Perkebunan dan Peternakan
58	Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak	dusun retok kuala rt 001 rw 001 ( 0,09295, 169,48031 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Bibit		Dinas Perkebunan dan Peternakan
59	Minimnya dukungan bibit ternak unggul untuk peningkatan populasi ternak	dusun retok bebantek rt 003 rw 003 ( 0,16699, 109,50404 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Bibit		Dinas Perkebunan dan Peternakan
60	Bantuan alat olahraga	Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala Mandor B Kab Kubu Raya (	Jumlah Alat Olahraga		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata

		0,0910N 109,4563E ), Kab. Kubu Raya			
61	Minimnya akses ke lahan pertanian (jalan usaha tani)	Desa Sungai Enau Dusun Padi Raya RT 004-005 RW 009 ( 0,1027N 109,4549 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah akses ke lahan pertanian yang dibangun		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
62	Minimnya dukungan sarana produksi tanaman padi	Desa Sungai Enau Kecamatan Kuala mandor B Kab Kubu raya, Kab. Kubu Raya	Jumlah sarana produksi tanaman padi		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
63	Bangunan gedung daerah kabupaten yang rusak/belum tersedia	Desa Sungai Enau Dusun Jaya Raya RT 001 RW 007 ( 0,09113, 109,45634 ), Kab. Kubu Raya	Jumlah Gedung daerah kabupaten yang diperbaiki/dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
64	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Desa Sungai Enau Dusun Jaya Raya RT 004 RW 007 Parit Sriwijaya ( 0,0922N 109,4508E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki/dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
65	Jalan dan jembatan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat	Desa sungai Enau Dusun Jaya Raya, Dusun Jaya RT 001 RW 007-RT 005 RW 008 ( 0,0919N 109,4517E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki/dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
66	Jalan dan jembatan lingkungan dalam kondisi rusak	Desa Sungai Enau Dusun Padi Raya RT 005 RW 007 Parit Rupi ( 0,1216N 109,4687E ), Kab. Kubu Raya	Jumlah jalan dan jembatan yang diperbaiki/dibangun		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
67	Perlunya bantuan sarana dan prasarana kepada lembaga kebudayaan dan lembaga kesenian	Desa Sungai Enau Dusun Jaya Raya RT 001 RW 007 ( 0,09113 109,45634, 3,2m ), Kab. Kubu Raya	Jumlah bantuan sarana dan prasarana Lembaga kebudayaan dan Lembaga kesenian		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

68	Pemeliharaan fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan	Desa Sungai Enau Dusun jaya raya RT 003 RW 007 Parit Sriwijaya ( 0,0999N 109,4557E, Kab. Kubu Raya	Jumlah fasilitas dan sarana/Dermaga penghubung Sungai, Danau dan Penyeberangan yang dipelihara		Dinas Perhubungan
----	--	--	--	--	-------------------

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kabupaten**

##### **3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Kuala Mandor B dalam kurun waktu 2019 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa,.
- b. serta mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

##### **3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Kabupaten**

Berdasarkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Visi yang ditetapkan SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B adalah :

**“TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DAN  
PEMBINAAN APARATUR YANG BERKUALITAS MENUJU  
MASYARAKAT YANG MAJU”**

Adapun maksud dan makna dari Visi Kecamatan Kuala Mandor B adalah sebagai berikut ;

1. **Terwujudnya** adalah Pencapaian yang diukur dari target indicator kinerja yang direncanakan.
2. **Pelayanan Publik Yang Optimal** adalah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai implentasi pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dalam pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan benar.
3. **Pembinaan Aparatur yang Berkualitas** adalah memberikan motivasi demi terciptanya rasa tanggung jawab dan dedikasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan serta peningkatan SDM Aparatur melalui bintek dan diklat

### 1. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih,serta memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Berdasarkan Visi Kabupaten Kubu Raya di atas maka oleh Bupati/Wakil Bupati Kubu Raya menetapkan Misi nya sebagai berikut :

1. Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)
2. Meningkatkan Pelayanan Publik yang Mendasar dan Perbaiki Kualitas Hidup Masyarakat
3. Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal
4. Meningkatkan Penguatan Aktivitas dan Kelembagaan Bernuansa Religius di Seluruh Lapisan Masyarakat
5. Meningkatkan Penguatan Peran Perempuan Untuk Peningkatan Kualitas dan Kemandirian Ekonomi

## 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### 3.2.1 Tujuan.

Untuk mendukung pencapaian visi, misi dimaksud maka harus ditetapkan lebih lanjut tentang tujuan yang akan dicapai. Tujuan dalam perumusan rencana strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi. Hasil akhir dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Dengan berpedoman pada kriteria yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

MISI	TUJUAN
Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa ( <i>Good and Clean Governance</i> )	Meningkatnya budaya kerja dan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa
Meningkatkan Penguatan Otonomi Desa untuk Pembangunan yang Berkeadilan dan Berdasarkan pada Nilai-Nilai Kearifan Lokal	Meningkatnya Kemandirian Desa

### 3.2.2 Sasaran Strategis

Selanjutnya Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan sasaran mengandung makna sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai memiliki kurun waktu tertentu ( tahunan, semesteran atau triwulan)

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam penentuan sasaran yang akan dicapai oleh suatu organisasi antara lain :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dinilai dan terukur;
- c. Menantang namun dapat dicapai;

- d. Berorientasi pada hasil;
- e. Dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pada kriteria yang telah dikemukakan di dalam tujuan tersebut di atas, maka ditetapkan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Camat Kuala Mandor B Tahun 2019– 2024 sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya status desa



**Tabel 3.1.****Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kuala Mandor B**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya kepuasan pelayanan kepada masyarakat	Kategori Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Nilai IKM	1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,00/A	81,35/A	81,37/A	81,43/A	81,52/A	82,00/A
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2	Nilai SAKIP	70,32 / BB	72,66 / BB	74,31 / BB	76,26 / BB	80,50 / A	80,00 / A
3	Meningkatnya Kemandirian Desa	Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri	3	Jumlah Desa Mandiri	0 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa	1 Desa

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kabupaten Kubu Raya dalam mendukung proses pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda.

#### **Sasaran Pertama : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Tingkat Kecamatan**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

Pada awal tahun 2021 terdapat 6 ( enam ) program , 11 ( sebelas ) kegiatan dan 27 (Sub Kegiatan) yang dianggarkan dengan rincian antara lain:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKDP
    - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pengadaan Meubelair
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
    - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
  - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perijinan Non Usaha
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Nonperijinan
    - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
  - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
    - a. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
      - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau
  5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
    - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
      - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
  6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
    - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
      - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
      - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
      - Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa
      - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan

**Sasaran Kedua : Meningkatkan Status Desa di Kecamatan**

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan program dan kegiatan sebagai berikut :

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah
  - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik
  - b. Penyusunan survey kepuasan masyarakat (SKM)

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2024**  
**Kabupaten Kubu Raya**

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>								
7	01				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3,093,321,546				
7	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas Kegiatan Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Kec. Kuala Mandor B	100%	2,709,185,006	APBD		100%	2,796,889,884
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	100%	27,242,800	APBD		100%	36,243,301
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	5 Dokumen	12,506,655	APBD		5 Dokumen	17,506,800
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Kuala Mandor B	1 Laporan	10,039,520	APBD		1 Laporan	11,039,826

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Kuala Mandor B	4 Laporan	4,696,625	APBD	4 Laporan	7,696,675
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>100%</b>	<b>2,333,872,378</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>2,380,294,814</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kuala Mandor B	18 Orang / Bulan	2,278,138,738	APBD	18 Orang / Bulan	2,372,340,769
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	12 Dokumen	44,880,000	APBD	12 Dokumen	47.160.000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Kuala Mandor B	1 Laporan	7,354,245	APBD	1 Laporan	6,354,350
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kec. Kuala Mandor B	1 Laporan	3,499,395	APBD	1 Laporan	1,599,695
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.03</b>		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>	<b>100%</b>	<b>5,280,300</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>6,180,692</b>

7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	1,430,940	APBD		1 Dokumen	1,631,000
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	2,349,540	APBD		1 Dokumen	2,849,857
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Kuala Mandor B		1 Laporan	1,499,820	APBD		1 Laporan	1,699,835
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>58,400,000</b>
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Kuala Mandor B		-	-	APBD		18 Stel	23,400,000
7	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Kuala Mandor B		3 Orang	-	APBD		3 Orang	35,000,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>174,464,617</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>185,255,024</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		2 Paket	2,932,600	APBD		2 Paket	3,236,200
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		4 Paket	62,800,517	APBD		4 Paket	65,802,279

7	01	01	2.06	05	penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		4 Paket	14,514,500	APBD		4 Paket	15,514,545
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratauran Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		360 Dokumen	-	APBD		360 Dokumen	920,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Kuala Mandor B		174 Laporan	94,217,000	APBD		176 Laporan	99,782,000
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>5 Unit</b>	<b>52,993,548</b>	<b>APBD</b>		<b>5 Unit</b>	<b>76,890,000</b>
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		1 Unit	29,478,400	APBD		1 Unit	37.000.000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		1 Unit	9,115,864	APBD		1 Unit	4,890,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec. Kuala Mandor B		1 Unit	14,499,000	APBD		1 Unit	15,000,000
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	Kec. Kuala Mandor B		2 Unit	-	APBD		2 Unit	20,000,000





7	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Peningkatan pelayanan Kepada Masyarakat</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>56,281,540</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6,511,380</b>
7	01	02	2.02		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>6,011,380</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>6,511,380</b>
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B		1 Laporan	6,011,380	APBD		1 Laporan	6,511,380
7	01	02	2.04		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>50,270,160</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>40,262,000</b>
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	3,431,000	APBD		1 Dokumen	3,631,000
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec. Kuala Mandor B		1 Laporan	3,431,000	APBD		1 Laporan	3,631,000
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Kuala Mandor B		1 Laporan	43,408,160	APBD		1 Laporan	33,000,000
7	01	03			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>77,729,377</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>78,729,760</b>

7	01	03	2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>2 Kegiatan</b>	<b>77,729,377</b>	<b>APBD</b>		<b>2 Kegiatan</b>	<b>78,729,760</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Kuala Mandor B		6 Lembaga Masyarakat	26,029,760	APBD		6 Lembaga Masyarakat	27,229,760
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B		1 Laporan	51,699,617	APBD		1 Laporan	51,500,000
7	01	04			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>33,662,000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>29,062,000</b>
7	01	04	2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah desa yang Dibina</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>6 Desa</b>	<b>33,662,000</b>	<b>APBD</b>		<b>6 Desa</b>	<b>29,062,000</b>
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec. Kuala Mandor B		63 Laporan	33,662,000	APBD		63 Laporan	29,062,000
7	01	05			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>62,591,515</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>63,591,515</b>

7	01	05	2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>62,591,515</b>	<b>APBD</b>		<b>1 Kegiatan</b>	<b>63,591,515</b>
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Kuala Mandor B		300 Orang	62,591,515	APBD		300 Orang	63,591,515
7	01	06			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>100%</b>	<b>157,018,500</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>139,068,500</b>
7	01	06	2.01		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah desa yang Dibina</b>	<b>Kec. Kuala Mandor B</b>		<b>6 Desa</b>	<b>157,018,500</b>	<b>APBD</b>		<b>6 Desa</b>	<b>139,068,500</b>
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	75,539,500	APBD		1 Dokumen	68,739,500

7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	3,000,000	APBD		1 Dokumen	3,350,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	39,539,500	APBD		1 Dokumen	32,739,500
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kec. Kuala Mandor B		1 Dokumen	2,400,000	APBD		1 Dokumen	2,900,000
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Kec. Kuala Mandor B		96 Laporan	36,539,500	APBD		96 Laporan	31,339,500
					<b>TOTAL</b>					<b>3,093,321,546</b>			-	<b>3,248,317,070</b>

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**Tabel 4.1**  
**Alokasi Anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Tahun 2023**  
**Kabupaten Kubu Raya**

KODE					PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	SUMBER DANA
7					<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		
7	01				<b>KECAMATAN</b>	<b>3,096,648,050</b>	
7	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2,709,365,118</b>	APBD
7	01	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27,243,301</b>	APBD
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,506,800	APBD
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,039,826	APBD
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,696,675	APBD
7	01	01	2.02		<b>Administrasi keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,335,31,378</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji ASN	2,278,138,738	APBD
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	46,320,000	APBD
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7,354,350	APBD
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran/SKPD	3,499,695	APBD
7	01	01	2.03		<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5,280,692</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,431,000	APBD
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2,349,857	APBD
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,499,835	APBD
7	01	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>174,744,024</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2,936,200	APBD
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	62,802,279	APBD
7	01	01	2.06	05	penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	14,514,545	APBD
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	94,491,000	APBD
7	01	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>53,960,288</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	30,000,000	APBD
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	9,461,288	APBD
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,499,000	APBD
7	01	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>101,858,220</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Listrik	17,600,000	APBD
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	84,258,220	APBD
7	01	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>10,965,810</b>	<b>APBD</b>
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	725,810	APBD
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	10,240,000	APBD

7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>56,281,540</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>	<b>6,011,380</b>	<b>APBD</b>
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6,011,380	APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>2.04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>50,270,160</b>	<b>APBD</b>
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	3,431,000	APBD
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3,431,000	APBD
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	43,408,160	APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>77,729,377</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>2.01</b>		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>77,729,377</b>	<b>APBD</b>
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	26,029,760	APBD
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51,699,617	APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>33,662,000</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>04</b>	<b>2.02</b>		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>33,662,000</b>	<b>APBD</b>
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	33,662,000	APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>62,591,515</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>62,591,515</b>	<b>APBD</b>
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	62,591,515	APBD
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>157,018,500</b>	<b>APBD</b>
<b>7</b>	<b>01</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>157,018,500</b>	<b>APBD</b>
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	75,539,500	APBD
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3,000,000	APBD
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	39,539,500	APBD
7	01	06	2.01	15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	2,400,000	APBD
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	36,539,500	APBD
					<b>TOTAL</b>	<b>3,096,648,050</b>	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2023. Dalam rangka menjamin adanya sinergi perencanaan pembangunan guna menjaga kesinambungan proses perencanaan dan untuk mengefektifkan pencapaian pembangunan di Kabupaten Kubu Raya secara umum dan Kecamatan Kuala Mandor B secara khusus maka Renja Kecamatan Kuala Mandor B disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kubu Raya dan Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya.

Substansi Renja Kecamatan Kuala Mandor B disusun dengan mempedomani Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Kecamatan Kuala Mandor B disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Kuala Mandor B.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya atas proses penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Kecamatan Kuala Mandor B, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang-bidang dan semua unsur teknis pelaksana kerja pada Kecamatan Kuala Mandor B, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.



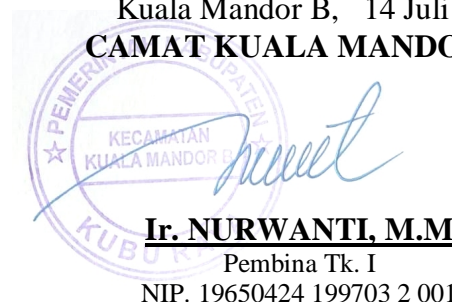
Kinerja Kecamatan Kuala Mandor B pada tahun 2023 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024. Sehingga berimplikasi terhadap mengakselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Kami berharap, bahwa Renja Kecamatan Kuala Mandor B ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh targetan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan, sebgaiian tata ruang dan statistik dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadainya anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian, dokumen Renja Kecamatan Kuala Mandor B ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Mandor B, 14 Juli 2022

**CAMAT KUALA MANDOR B**



**Ir. NURWANTI, M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19650424 199703 2 001

